

The Urgency to Provide Legal Assistance and Sign Language Interpreter for Women with Hearing Disabilities as Victims of Sexual Violence in the Investigation Process at Sleman Regency

Author:

Fierra Nabella Wijanarko¹ and Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M.(HR), Ph.D.²

ABSTRACT

Women with hearing disabilities are one of the vulnerable groups that has multiple discrimination including sexual violence because of their condition. This legal research has a purpose of understanding whether Sleman has provided an inclusive environment for women with hearing disabilities in investigation process that includes legal assistance and sign language interpreter, since Sleman has the highest number of sexual violence in Special Province of Yogyakarta.

This legal research employs a combination of normative and empirical approach. The normative approach is important to analyze regulation as well as literature related to the issues. The empirical approach is needed to determine whether the law has been implemented to law enforcement and the victim that has already experienced a sexual violence case run in investigation process.

This legal research comes to a conclusion that *firstly*, the provision of sign language interpreter and legal assistance in investigation process is manifested through FPKK, which is a networking system that is chaired by UPTD PPA Sleman and has members including Polres Sleman as well as NGOs that advocates protection for people with disabilities; *secondly*, there are several obstacles related to the issues which consists of mobility, resources, behavior, legal proceeding, and communication.

Keywords: Women with Hearing Disabilities, Victims, Sexual Violence, Investigation Process, FPKK, UPTD PPA.

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016)

² Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

***Urgensi untuk Memberikan Pendamping Hukum dan Juru Bahasa Isyarat
untuk Perempuan Penyandang Disabilitas Tuli sebagai Korban Kekerasan
Seksual dalam Proses Penyidikan di Kabupaten Sleman***

Oleh:

Fierra Nabella Wijanarko³ dan Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M.(HR), Ph.D.⁴

INTISARI

Perempuan penyandang disabilitas tuli adalah salah satu kelompok rentan yang mengalami diskriminasi berlapis termasuk kekerasan seksual. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memahami apakah Sleman telah menyediakan lingkungan yang inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas tuli dalam proses penyidikan yang mencakup pendamping hukum dan penerjemah bahasa isyarat, karena Sleman memiliki jumlah kekerasan seksual tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif dan empiris. Pendekatan normatif penting untuk menganalisa peraturan serta literatur yang terkait dengan masalah tersebut. Pendekatan empiris diperlukan untuk menentukan apakah hukum telah diterapkan pada penegakan hukum dan korban yang telah mengalami kasus kekerasan seksual dalam proses penyidikan.

Penelitian hukum ini sampai pada kesimpulan bahwa pertama, penyediaan juru bahasa isyarat dan pendamping hukum dalam proses penyidikan diimplementasikan melalui FPKK, yang merupakan sistem jaringan yang diketuai oleh UPTD PPA Sleman dan memiliki anggota termasuk Polres Sleman serta LSM yang mengadvokasikan perlindungan bagi para penyandang cacat; kedua, ada beberapa kendala terkait permasalahan ini yang terdiri dari mobilitas, sumber daya, perilaku, proses hukum, dan komunikasi.

Kata Kunci: *Perempuan Penyandang Disabilitas Tuli, Korban, Kekerasan Seksual, Proses Penyidikan, FPKK, UPTD PPA.*

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016)

⁴ Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada